



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2018

### DAFTAR ISI

<i>TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR</i> <b>Katubi</b> .....	1-16
ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH <b>Ahrie Sonta</b> .....	17-35
WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA <b>Abd. Rahman</b> .....	36-47
SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965 Ganesh Cintika Putri .....	48-59
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA <b>Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani</b> .....	60-75
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO <b>Nabilla Nailur Rohmah</b> .....	76-87
RITUAL <i>BEDEKEH</i> SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL <b>Suroyo</b> .....	88-97
TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN <b>Puji Hastuti</b> .....	98-102
TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i> <b>Muhammad Luthf</b> .....	103-118



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

### DAFTAR ISI

<i>TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR</i> <b>Katubi</b> .....	1-16
ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH <b>Ahrie Sonta</b> .....	17-35
WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA <b>Abd. Rahman</b> .....	36-47
SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965 Ganesh Cintika Putri .....	48-59
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA <b>Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani</b> .....	60-75
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO <b>Nabilla Nailur Rohmah</b> .....	76-87
RITUAL <i>BEDEKEH</i> SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL <b>Suroyo</b> .....	88-97
TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN <b>Puji Hastuti</b> .....	98-102
TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i> <b>Muhammad Luthfi</b> .....	103-118



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

**DDC:****Katubi****TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

**ABSTRAK**

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia akhir-akhir ini menjadi masalah serius dalam konstruksi kehidupan multikultur. Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap berhasil dalam menjaga toleransi, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Alor-Pantar. Bahkan, ketika konflik dahsyat dengan isu agama melanda sebagian wilayah Indonesia bagian timur pasca-runtuhnya Orde Baru, solidaritas komunitas lokal orang Alor-Pantar mampu membuat mereka terhindar dari konflik dahsyat tersebut. Hal itu karena sejak dulu orang-orang di tiap kampung di Pulau Alor-Pantar mengembangkan cara untuk menghindari konflik, termasuk konflik yang bernuansa agama, berbasis tradisi. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat di Kepulauan Alor-Pantar dan hubungannya dengan adat banyak mengundang minat para akademisi untuk membahasnya. Berbeda dengan berbagai tulisan para akademisi sebelumnya, tulisan ini membahas tradisi komunitas Muslim dan Kristiani di Alor dalam menata kehidupan mereka melalui nilai kebudayaan dengan memberikan penghormatan khusus pada tradisi lokal, yakni semboyan *Tara miti Tomi nuku*, yang artinya 'berbeda-beda tetapi satu bersaudara.' Untuk membahas persoalan itu, tradisi lisan *lego-lego* menjadi titik tekan pembahasan. Tulisan ini berdasar penelitian lapangan dengan metode etnografi. Berdasar analisis pelaksanaan tradisi lisan *lego-lego* dan lirik *lego-lego*, tulisan ini memaparkan dua hal, yaitu 1) praktik sosial-budaya yang telah dilakukan antarkelompok beragama yang berbeda dalam menjaga toleransi, 2) cara berbagai kelompok etnis di Alor mengajarkan pentingnya saling menghargai antarumat beragama melalui tradisi lisan *lego-lego*, terutama melalui lirik lagunya.

**Kata kunci:** *toleransi beragama, tara miti tomi nuku, lego-lego, tradisi lisan, Alor, multikulturalisme***DDC:****Ahrie Sonta****ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

**ABSTRACT**

*This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police habitus at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police doxa as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In*

*the time being, on personel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personel integrity, particularly at the resort level police organization.*

**Keywords:** *Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent*

---

**DDC:**

**Abd. Rahman**

## **WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

### **ABSTRAK**

Paper ini bertujuan membahas secara singkat mengenai situasi keterpinggiran Loloda di Pesisir Pantai Barat Halmahera dalam segala sektor pembangunan dibandingkan daerah-daerah lainnya di Maluku Utara. Berbicara mengenai Maluku Utara, tidaklah lengkap apabila tidak membicarakan Loloda, sebagai bagian integral dari dunia Maluku. Informasi sezaman menyatakan bahwa Loloda merupakan bekas kerajaan tertua Maluku (Moloku Loloda) di pesisir pantai barat laut Halmahera, Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Loloda merupakan bagian utama dari sejarah dan kebudayaan “dunia Maluku” sejak berdirinya pada abad ke-13 Masehi. Upaya mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi Kerajaan Loloda terus berlagsung hingga kini, meskipun sejak periode orde lama (1950-1969) seluruh daerah di Indonesia yang dahulunya berbasis kerajaan atau Kesultanan telah dihapuskan. Daerah-daerah itu diintegrasikan ke dalam nomenklatur sistem administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian itu merupakan restrukturisasi Pemerintahan Republik Indonesia ke dalam bentuknya yang baru dan resmi, selama lebih dari dua dekade masa kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah masih ada kekuatan hegemonik Ternate sebagai Warisan Kolonial Hindia Belanda atas Loloda, sehingga daerah bekas kerajaan Maluku tertua ini masih terpinggirkan dari pembangunan daerah dan nasional? Penulisan ini menggunakan metode dan metodologi sejarah, melalui studi-studi kepustakaan, kearsipan, dan pengamatan di lapangan, serta wawancara lisan dengan informan-informan terpilih.

**Kata Kunci:** *Loloda, Halmahera, Warisan, Kolonial, Marginalisasi.*

---

**DDC:**

**Ganesh Cintika Putri**

## **SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

### **ABSTRAK**

Pembunuhan massal dan penghilangan paksa yang terjadi pasca tragedi 1965 menyisakan konflik berkepanjangan hingga kini. Narasi sejarah yang dibentuk pemerintah menempatkan sekelompok orang yang diduga berkaitan dengan PKI mengalami stigmatisasi dan ketidakadilan hingga 40 tahun setelahnya. Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi yang dilakukan masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater Gejolak Makam Keramat pada 13 Juli 2017 di Yogyakarta. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater Gejolak Makam Keramat memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persekusi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan audience dalam proses penyajian narasi.

**Kata kunci:** *seni, teater, rekonsiliasi, narasi alternatif*

---

**DDC:**

**Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani**  
**LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM**  
**MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

**ABSTRAK**

Studi marginal mendekati fokus kajian sering pada identitas suatu komunitas tempatan, tanpa di sadari, pandangan tersebut mengkonstruksi dimensi marginal yang anakronistik. Studi tersebut menjerumuskan masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina, dan memunculkan romantisme. Studi yang dilakukan di Kepulauan Sangihe, berdasar pada fakta-fakta etnografis dan historis, serta observasi yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2018. Kami menggunkan hubungan relasional untuk menangkap plot transformasi pada catatan Eropa serta kajian historis yang sudah diterbitkan. Hubungan tersebut pada dasarnya mendeskripsikan kelompok pejuang yaitu buruh paksa yang dijadikan budak. Transformasi tidak meninggalkan dimensi tradisional, khususnya adalah bagaimana penguasaan selama ini dilakukan oleh sistem ekonomi Feodalisme hingga Kapitalisme. Di wilayah perbatasan, Orang Sangir yang tinggal dekat dengan laut melakukan mobilisasi sebelum orang-orang Eropa datang, dan dimensi tradisional tersebut masih dilakukan, tetapi dibawah kuasa baru, yaitu negara modern. Mendasarkan diri pada isu transnasionalisme dan sekuritas, Indonesia dan Filipina membuat regulasi yang mengatur mobilitas migran. Pada akhirnya, Orang Sangir tersebut merasa selalu menjadi kriminal, disematkan stigma ilegal, tereksklusi dari kepulauannya sendiri di mana masyarakat yang tidak tinggal di Sangihe Besar mengklaim dirinya sebagai *Orang Pulo*. Kami melihat bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Filipina sebagai wilayah abu-abu, cair, dan laboratorium kreatif.

*Keywords: Marginal, Hubungan Relasional, Legal-Ilegal, Orang Sangir*

---

**DDC:**

**Nabilla Nailur Rohmah**  
**BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS,**  
**LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji signifikansi historis ajaran leluhur dan lanskap Puncak Songolukur bagi masyarakat Tengger di Senduro dan bagaimana historisitas tersebut dimaknai, direpresentasikan, dan direkonstruksi dalam konteks sejarah masa kini. Dalam tulisan ini, cerita rakyat Tengger tentang “Joko Seger dan Roro Anteng” tidak dikaji sebagai legenda ataupun mitos, melainkan sebagai sejarah publik yang memiliki relevansi dengan realita sosial masa kini. Bagi orang Tengger, cerita mengenai asal-usul leluhurnya menyangkut keseluruhan kerangka teologis yang mendasari tatanan sosial dan praktik kultural dalam kehidupan kesehariaanya. Kebijakan Lima Agama Mayoritas rezim Orde Baru telah menyebabkan Hinduisasi dan Islamisasi besar-besaran, yang juga berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan kultural masyarakat Tengger. Terlebih lagi, penerapan kebijakan Taman Nasional dan Pariwisata di ruang hidup mereka telah melahirkan tantangan yang lebih besar, yang memanifestasikan tatanan kehidupan yang semakin kapitalistik dan profan. Dalam kondisi ini, Puncak Songolukur menghadirkan dan merawat narasi historis mengenai leluhur masyarakat Tengger di Senduro, sebagaimana pula merawat nilai-nilai spiritual, tatanan sosial, praktik budaya, dan keseluruhan cara hidup yang menyertainya. Namun, pengembangan destinasi wisata “Puncak B29” di lanskap Puncak Songolukur sejak 2013 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi narasi sejarah masyarakat Tengger Senduro. Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bagaimana pengembangan pariwisata dapat berpeluang menjaga sekaligus mengkontestasikan historisitas Puncak Songolukur. Pembahasan tersebut menyangkut bagaimana masyarakat Tengger di Senduro menegaskan, menegosiasikan, dan mengartikulasikan kembali identitasnya dalam konteks sejarah hari ini.

*Kata kunci: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolukur, Historisitas, Artikulasi*

---

**DDC:**  
**Suroyo**

**RINGKASAN DISERTASI:**  
**RITUAL *BEDEKEH* SUKU AKIT DI PULAU RUPAT**  
**KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

**ABSTRAK**

Ritual *bedekeh* sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Akit. Suku Akit menggunakan sistem pengetahuan, kepercayaan persepsi sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi mereka terhadap konsep sehat dan sakit serta penyebab sakit tersebut. Suku Akit dan masyarakat pendukungnya telah memiliki pengetahuan lokal (*local knowlegde*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengatasi masalah kesehatan dan cara mengobatinya apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Penelitian ini membahas tradisi ritual *bedekeh* suku Akit di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tradisi ini masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat suku Akit, tetapi keberadaan sekarang semakin terpinggirkan oleh faktor intern dan ekstern. Pelaksanaan ritual *bedikie* banyak mengandung kearifan lokal, simbol, nilai, dan dampak bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penelitian ritual *bedekeh* oleh *bomoh* pada suku Akit di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dirancang sesuai dengan paradigma keilmuan kajian budaya (*cultural studies*). Sebagai landasan analisis, digunakan teori hegemoni, teori praktik, dan teori wacana relasi kuasa dan pengetahuan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan telaah dan metode analisis pelaksanaan upacara ritual mempunyai tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut Pertama, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan perlengkapan upacara ritual dipimpin oleh *Batin* dan *Bomoh* menentukan waktu untuk mengadakan ritual. Kedua, penyerahan, yaitu *Bomoh* menyerahkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam upacara pelaksanaan ritual, Ketiga, *tegak bomoh*, yaitu berlangsungnya upacara ritual pengobatan oleh *bomoh*. Faktor yang memengaruhi semakin terpinggirnya ritual *bedekeh* suku Akit di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah relasi kuasa dalam konversi agama, stigma negatif bahwa orang Akit terkenal dengan ilmu sihir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pengobatan modern dan pengaruh pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang dan cara berpikir manusia. Implikasi dari keterpinggiran ritual *bedekeh* adalah sikap terbuka suku Akit melalui kontak budaya (akulturasi) dengan kebudayaan lain, penyederhanaan praktik ritual oleh *bomoh* dalam dimensi waktu, dan semakin menguatnya identitas suku Akit. Upaya yang dilakukan sebagai langkah strategis pewarisan ritual *bedekeh* secara intern dan ekstern. Profesi *bomoh* dianggap sangat membantu dan masih dibutuhkan untuk pengobatan, pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada profesi *bomoh* dari segi pendanaan (tunjangan) agar lebih fokus terhadap profesi sebagai pengobat tradisional.

*Kata kunci: bedikie, bomoh, suku Akit, keterpinggiran, pewarisan*

---

**DDC:**  
**Puji Hastuti**  
**TINJAUAN BUKU:**  
**EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN**  
**BERKELANJUTAN**

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

---

**DDC:**

**Muhammad Luthfi**

**TINJAUAN BUKU:**

**MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA,**

**REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA:***

***QUO VADIS?***

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. *STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis?* PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

**DDC:****Katubi****TARA MITI TOMI NUKU: NURTURING TOLERANCE OF TRADITION IN ALOR, EAST NUSA TENGGARA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

**ABSTRACT**

The increase of religious intolerance in Indonesia has recently become a serious problem in the construction of multicultural life. However, some areas in Indonesia are considered successful in maintaining tolerance, for instance, in the Province of East Nusa Tenggara, particularly in Alor-Pantar Island. When a great conflict in the context of religious issues occurred in parts of Eastern Indonesia after the collapse of the New Order, the Alor-Pantar local community could avoid this terrible conflict due to their solidarity. It is because people from each village in Alor-Pantar Island have developed means to avoid conflicts based on tradition, including conflicts in religious terms. Therefore, academics are encouraged to discuss about the religious life of the people in the Alor-Pantar Island and its relationship with customs. Different from prior writings, this article discusses the traditions of the Muslim and Christian communities in Alor in undergoing their lives through cultural values by giving special respect to a local tradition, *Tara miti Tomi nuku*, which means 'brotherhood in diversity'. To disclose this issue, the oral tradition of *lego-lego* will be the center of discussion. This paper is based on field research using ethnographic methods. Based on the analysis of the implementation of the *lego-lego's* oral tradition and the *lego-lego's* lyrics, this paper describes two things, which are 1) socio-cultural practices that have been carried out by different religious groups in maintaining tolerance; 2) means that various ethnic groups in Alor have been undertaken to teach the importance of interfaith mutual respect through the oral tradition of *lego-lego*, especially through the lyrics of the song.

**Keywords:** *religious tolerance, tara miti tomi nuku, lego-lego, oral tradition, Alor, multiculturalism***DDC:****Ahrie Sonta****ETHICAL CULTURE'S STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

**ABSTRACT**

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police *habitus* at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police *doxa* as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence

of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In the time being, on personel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personel integrity, particularly at the resort level police organization.

*Keywords: Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent*

---

**DDC:**

**Abd. Rahman**

### **COLONIAL HERITAGE AND MARGINALIZATION OF THE LOLODA PEOPLE ON THE WEST COAST OF HALMAHERA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

#### **ABSTRACT**

This paper aims to briefly discuss the marginalized situation of the Loloda people on the west coast of Halmahera in all development sectors compared to other regions in North Maluku. Discussing North Maluku, it is not complete without talking about Loloda as an integral part of the Moluccas' world. Contemporary information states that Loloda is the oldest kingdom of Moluccas (Moloku Loloda) on the northwest coast of Halmahera, the Molucca Sea Region and Islands. Loloda is the main part of the history and culture of the "Moluccan world" since its foundation in the 13th Century. Attempts to maintain and preserve customs and traditions of the Kingdom of Loloda are still ongoing until today, although since the Old Order period (1950-1969), all regions in Indonesia dominated by the Kingdom and Sultanate systems were abolished. Those regions are integrated into the nomenclature of the regional administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This integration is the realization of restructuring the Republic of Indonesia to the new and official form for more than two decades of independence. The question is whether or not the hegemonic power of Ternate as the Dutch East Indies' colonial heritage of Loloda remains in existence, so the former area of the oldest kingdom of Moluccas is still marginalized from regional and national development. This article utilizes historical methods and methodologies throughout a study of literature, archives, and field observations, as well as interviews with selected resource persons.

*Keywords: Loloda, Halmahera, Heritage, Colonial, Marginalization*

---

**DDC:**

**Ganesh Cintika Putri**

### **ART FOR PEACE: GRASSROOTS' RECONCILIATION EFFORTS AFTER THE 1965 TRAGEDY**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

#### **ABSTRACT**

Mass killings and enforced disappearances which occurred after the 1965 tragedy have been becoming a prolonged conflict until today. The historical narrative shaped by the government puts a group of people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) experiencing stigmatization and injustice for up to 40 years. This paper intends to analyze the strategies undertaken by grassroots communities to create alternative narratives as a part of the reconciliation efforts. Particularly, this paper will examine the alternative historical narratives presented in the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance on July 13, 2017, in Yogyakarta. This performance was chosen due to the arts of scripts making, practices, choices of speaking methods, and the involvement of audiences which were able to narrate alternative history amidst the dominance of narratives that hindered the reconciliation attempts. This paper would like to say that the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance has contributed a space to historical narratives as a part of grassroots reconciliation efforts. There are, at least, three strategies implemented to achieve those objectives, which are: the packaging of alternative narratives in an art object which is safer than persecution; the participation of survivors as the subject of the narrative, and; the involvement of audiences in the process of presenting the narration.

*Keywords: art, theater, reconciliation, alternative narratives*

---

**DDC:**

**Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani**

**MARGINALIZATION LEVELS AND ILLEGAL CONSTRUCTION IN BORDER COMMUNITIES ON THE INDONESIA-THE PHILIPPINES BORDER**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

**ABSTRACT**

Marginal studies often focus on the identity of a local community which unconsciously construct an anachronistic marginal dimension. That study also plunged the people of the Indonesia-the Philippines border and showed up romanticism. The research was conducted on Sangihe Islands, based on ethnographic and historical facts and observations undertaken in July-August, 2018. We use relational relations to capture the plot of transformation in European records and historical studies that have been published. The relationship describes a group of fighters which consisted of forced laborers who became slaves. Transformation cannot be disengaged from the traditional dimension, particularly on how control has been ruled out by the dominance of the economic system of Feudalism to Capitalism. In the border area, the Sangir people, who resided nearby the sea, mobilized before the Europeans arrived. The traditional dimension was still carried out, but under the new authority, which is the modern state. Based on the issues of transnationalism and security, Indonesia and the Philippines made a regulation that regulated the mobility of migrants. The Sangir people, eventually, found themselves as criminals, which were identic with illegal stigma, and were excluded from their own islands where people who did not live in Sangihe Besar claimed themselves as *Orang Pulo*. We perceive the Indonesia-the Philippines border as a gray, liquid, and creative laboratory area.

*Keywords: Marginal, Relational Relations, Legal-Illegal, Sangir People*

---

**DDC:**

**Nabilla Nailur Rohmah**

**SIDE BY SIDE WITH ANCESTORS IN THE FUTURE: HISTORICAL, LANDSCAPE, AND ARTICULATION OF THE IDENTITY OF THE TENGGER SENDURO PEOPLE**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

**ABSTRACT**

This article studies the historical significance of the ancestral tenet and the landscape of Puncak Songolikur for Tengger people in Senduro and how they are being performed, represented, and reconstructed in the present historical context. In this paper, the Folklore of Tengger about “Joko Seger and Roro Anteng” is studied neither as legend nor myth, but as public history which has relevance to the present social realities. For them, the story of the origin of their ancestor encompasses the overall theological framework that underlies the social order and cultural practices in their everyday life. The five religions policy during the authoritarian New Order regime has led to a massive Hinduization and Islamization which has a great influence on the social and cultural order of Tengger people. Moreover, the enforcement of national park and tourism policy in their living space has raised greater challenge which manifests an increasingly capitalistic and profane life order. Under this condition, Puncak Songolikur presents and preserves the historical narrative about their ancestors as well as spiritual values, social order, cultural practice, and life. However, the development of tourist destination “Puncak B29” in the landscape of Puncak Songolikur since 2013 has become both a challenge and opportunity for their historical narratives. This paper explores how tourism development maintains and simultaneously contests the historicity of Puncak Songolikur. It includes how people assert, negotiate, and rearticulate their identity in current cosmopolite historical horizon.

*Keywords: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolikur, Historicity, Articulation*

---

**DDC:**

**Suroyo**

**DISSERTATION SUMMARY: THE *BEDEKEH* RITUAL OF THE AKIT PEOPLE IN RUPAT ISLAND, BENGKALIS REGENCY, RIAU PROVINCE, IN THE GLOBAL ERA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

**ABSTRACT**

The *bedekéh* ritual is closely linked to the customs and traditions of the Akit people. The Akit people use the system of knowledge in which the belief in perception as a part of their culture and tradition towards health and sick concepts as well as the causes of diseases. The Akit people and their relatives utilize local knowledge and local wisdom in overcoming health problems as well as a means to cure the diseases. This research discusses the ritual tradition of *bedekéh* traditionally held by the Akit people in Rupert Island, Bengkalis Regency, Riau Province. The Akit people remain practicing this tradition, but its existence is now slowly marginalized by internal and external factors. *Bedekie rituals* encompass a lot of local wisdom, symbols, values, and impacts for the lives of the Akit People. Research on *bedekéh rituals* by the *bomoh* of the Akit people in Rupert Island, Bengkalis Regency, Riau Province was designed based on the scientific paradigm of cultural studies. As an analysis framework, hegemony, practical, and power and knowledge relations theories are used to sharpen the research result. The data collection was undertaken through observations, in-depth interviews, a study of literature, and documentation.

Based on research and analysis methods, the implementation of rituals has several steps to be done. First, an investigation in which the inspection of ritual equipment is done and led by *Batin*, and *Bomoh* determines the time to hold the rituals. Secondly, a handover in which *Bomoh* gives the necessary equipment and materials for the implementation of rituals. Thirdly, *tegak bomoh* in which *bomoh* conducts the rituals for treating sick people. Some factors affecting the marginalized condition of *bedekéh* rituals of the Akit people in Hutan Panjang Village, Rupert District, Bengkalis Regency, Riau Province are power relations in religious conversion. It is seen that there is a negative perspective towards the Akit People who are famous for witchcraft, the development of science and technology in the modern medical system, and the influence of formal and non-formal education on various levels and the changing of ways of thinking in human beings. The impacts of the marginalized condition of *bedekéh* ritual are: the Akit people are more open in which cultural contacts (acculturation) occurred with other cultures, the ritual practices are simplified by *bomoh*, and the identity of the Akit people is getting stronger. These attempts are done as strategic steps to inherit *bedekéh* rituals internally and externally. *Bomoh* is considered very helpful and is still necessary for medication. The government is expected to provide assistance to *bomoh* in the context of funding (allowances) in order to be more focus on their job as a traditional healer.

*Keywords: bedikie, bomoh, Akit, marginalization, inheritance*

---

**DDC:**

**Puji Hastuti**

**TINJAUAN BUKU: EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

---

**DDC:**

**Muhammad Luthfi**

**TINJAUAN BUKU: MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?***

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. *STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis?* PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118

# SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965

Ganesh Cintika Putri

Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI

## ABSTRAK

Pembunuhan massal dan penghilangan paksa yang terjadi pasca tragedi 1965 menyisakan konflik berkepanjangan hingga kini. Narasi sejarah yang dibentuk pemerintah menempatkan sekelompok orang yang diduga berkaitan dengan PKI mengalami stigmatisasi dan ketidakadilan hingga 40 tahun setelahnya. Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi yang dilakukan masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater *Gejolak Makam Keramat* pada 13 Juli 2017 di Yogyakarta. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater *Gejolak Makam Keramat* memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persekusi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan audience dalam proses penyajian narasi.

**Kata kunci:** seni, teater, rekonsiliasi, narasi alternatif

## ABSTRACT

*Mass killings and enforced disappearances which occurred after the 1965 tragedy have been becoming a prolonged conflict until today. The historical narrative shaped by the government puts a group of people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) experiencing stigmatization and injustice for up to 40 years. This paper intends to analyze the strategies undertaken by grassroots communities to create alternative narratives as a part of the reconciliation efforts. Particularly, this paper will examine the alternative historical narratives presented in the *Gejolak Makam Keramat* Theatrical Performance on July 13, 2017, in Yogyakarta. This performance was chosen due to the arts of scripts making, practices, choices of speaking methods, and the involvement of audiences which were able to narrate alternative history amidst the dominance of narratives that hindered the reconciliation attempts. This paper would like to say that the *Gejolak Makam Keramat* Theatrical Performance has contributed a space to historical narratives as a part of grassroots reconciliation efforts. There are, at least, three strategies implemented to achieve those objectives, which are: the packaging of alternative narratives in an art object which is safer than persecution; the participation of survivors as the subject of the narrative, and; the involvement of audiences in the process of presenting the narration.*

**Keywords:** art, theater, reconciliation, alternative narratives

## PENDAHULUAN

Pembunuhan massal yang terjadi pasca peristiwa 30 September 1965 masih menyisakan konflik yang laten hingga kini. Kekerasan yang dimulai dengan pembunuhan enam Jenderal dan satu Letnan Kolonel ini disebut sebagai upaya kudeta oleh sebuah kelompok bernama Dewan Jenderal.

Kekacauan ini kemudian menjadi pembenaran atas respon militer pimpinan Jenderal Suharto untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Pada akhirnya, pemerintahan darurat bentukan militer ini berlangsung hingga 32 tahun lamanya. Selama 32 tahun rezim orde baru berdiri, pemerintah terus-menerus membentuk

\* Penulis pernah bekerja di Institute of International Studies sebagai staf advokasi. Beberapa kali bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta dalam mendampingi penyintas 1965. Penulis juga terlibat sebagai relawan penonton dalam Teater *Gejolak Makam Keramat* yang menjadi studi kasus dalam tulisan ini. Tulisan ini murni hasil pemikiran pribadi tanpa berafiliasi dengan lembaga apapun.

narasi yang hitam-putih tentang pelaku dan korban tragedi 1965. Lewat simbol, monumen, pendidikan sejarah dan slogan-slogan, pemerintah menempatkan PKI sebagai pelaku utama tragedi 1965. PKI seketika menjadi hantu bagi masyarakat yang oleh karenanya patut untuk dimusnahkan, sementara fakta bahwa terdapat hampir setengah juta orang yang dibunuh antara 1965-1966 dan jutaan lainnya ditangkap, ditahan, dan dihilangkan paksa tanpa proses hukum yang jelas sama sekali tidak tersentuh (Wahyuningroem, 2013:119).

Narasi yang hitam putih ini akhirnya menyisakan konflik yang belum selesai bahkan hingga 43 tahun setelahnya. Terlepas dari klaim siapa korban atau pelaku di balik tragedi ini, kekerasan ini berbuntut pada konflik yang terjadi di dua level. Pertama, konflik horisontal antara pihak-pihak yang diduga terlibat dalam partai komunis dengan masyarakat lainnya –terutama kelompok Islam. Kedua, konflik vertikal antara negara dengan penyintas 1965 yang tergambarkan lewat kebijakan struktural yang diskriminatif. Kebijakan struktural ini kemudian turut mempengaruhi relasi aktor dalam konflik horisontal.

Upaya rekonsiliasi yang menyoal konflik di atas telah banyak dibahas dalam literatur Indonesia, di antaranya tulisan Leksana (2009), Brauchler, et.al (2009), dan Wahyuningroem (2013). Tulisan yang sudah ada secara umum mengkategorikan upaya rekonsiliasi menjadi dua macam, yaitu rekonsiliasi akar rumput yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, serta rekonsiliasi oleh pemerintah dengan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menaruh perhatian pada rekonsiliasi tingkat akar rumput. Paling tidak ada tiga alasan yang membuat penulis tertarik pada rekonsiliasi akar rumput. Pertama, sifatnya yang sporadis membuat kajian tentang rekonsiliasi akar rumput tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga penting untuk melihat pola yang terjadi dan mereplikasinya jika memungkinkan. Kedua, rekonsiliasi akar rumput cenderung melibatkan penyintas sebagai pelaku rekonsiliasi, bukan objek pasif yang dikenai kebijakan. Oleh karena itu, rekonsiliasi akar rumput menempatkan pihak-pihak dalam posisi yang setara (De Brito, et.al, 2001). Ketiga, konflik di tahun 1965 tidak

terjadi di level pemerintah saja, namun antara satu rumah tangga dengan lainnya. Dengan begitu rekonsiliasi di tingkat akar rumput membuka peluang pada terbukanya ruang antar individu untuk melihat pihak-pihak yang terlibat sebagai manusia, bukan bagian dari partai atau kelompok tertentu.

Sebelumnya, rekonsiliasi akar rumput telah banyak dilakukan mulai dari diskusi hingga pemutaran film. Secara umum, agenda yang dimiliki sama yaitu untuk menggali kembali memori tentang 1965 dari sudut pandang yang berbeda. Secara khusus, tulisan ini ingin menilik metode rekonsiliasi yang dilakukan oleh penyintas di Yogyakarta menggunakan kanal-kanal seni. Sulit untuk melacak sejak kapan metode seni dilakukan oleh organisasi bawah rumput. Namun, panasnya suhu politik pada pemilu 2014 yang memicu reaksi keras kelompok radikal terhadap isu kebangkitan komunis membuat organisasi akar rumput mencari cara yang lebih kreatif untuk masuk dalam perebutan ruang narasi. Beberapa upaya seni yang berhasil didokumentasikan misalnya teater Nyanyi Sunyi Kembang Bisu, teater Gejolak Makam Keramat yang diperankan langsung oleh penyintas 1965 di Yogyakarta, workshop cipta lagu oleh penyintas dan seniman di Yogyakarta serta konser musik oleh paduan suara Dialita yang semuanya terdiri dari penyintas dan keluarganya. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater Gejolak Makam Keramat pada 13 Juli 2017. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi.

Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater Gejolak Makam Keramat memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persekusi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan *audience* dalam proses penyajian narasi. Untuk memahami tiga strategi tersebut,

tulisan ini akan terlebih dahulu mendedah problem narasi sejarah Indonesia yang hitam-putih serta konsep rekonsiliasi yang akan digunakan.

## **KEKERASAN POLITIK 1965 DAN NARASI SEJARAH YANG HITAM PUTIH**

Berdasar studi literatur yang ada, paling tidak terdapat lima skenario peristiwa yang ditawarkan baik oleh negara, peneliti, media nasional maupun internasional untuk menjelaskan bagaimana kekerasan politik 1965 terjadi (Roosa, 2008; McGregor, 2018; Robinson, 2018; Melvin, 2018). Pertanyaan yang berusaha dijawab kurang lebih meliputi: apa motif di balik kekerasan; siapa dalang dan apa dalihnya; serta siapa dan seberapa banyak korban yang berjatuh. Narasi pertama merupakan tulisan sejarawan Ismail Saleh dan Nugroho Notosusanto yang sekaligus menjadi narasi versi pemerintah. Narasi ini berusaha mengatakan bahwa pembunuhan Jenderal sepenuhnya direncanakan dan dieksekusi oleh PKI serta simpatisannya. Pembunuhan yang terjadi setelahnya adalah upaya negara dalam mengamankan kedaulatan dari kelompok berbahaya PKI. Kedua, upaya kudeta adalah dampak dari perseteruan internal angkatan darat. Ketiga, Jenderal Suharto merupakan orang di balik kudeta yang paling tidak mempengaruhi atau memanipulasi pembunuhan Jenderal untuk kepentingannya sendiri. Keempat, Presiden Sukarno mengizinkan atau justru mendorong kelompok-kelompok yang ingin melakukan revolusi terhadap negara. Kelima, adanya operasi intelijen asing yang turut berpengaruh dalam kekerasan politik 1965. Selain kelima pendapat ini, masih ada beberapa pendapat lain yang coba mengkombinasikan kelima skenario di atas.

Pandangan yang berbeda diajukan oleh Anderson dan McVey (McGregor, 2018) yang menyebutkan peristiwa malam 1 Oktober 1965 merupakan fenomena yang terpisah dengan pembunuhan massal yang terjadi setelahnya. Menurut Anderson, terlepas dari dalang pembunuhan Jenderal dan motif di baliknya, pembunuhan massal yang menimpa ratusan ribu rakyat Indonesia merupakan kejahatan genosida yang tidak pernah bisa dibenarkan

apapun alasannya. Meski begitu, pembunuhan massal yang terjadi pasca Peristiwa 30 September 1965, secara hukum tidak dapat dipahami sebagai kejahatan genosida (McGregor, 2018). Pertama, hingga sekarang belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kekerasan tersebut disponsori oleh negara. Kekerasan yang terjadi malah disebut sebagai bentuk respon spontan masyarakat dalam menghadapi komunis yang telah membunuh para Jenderal. Kedua, pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia belum memenuhi definisi objek genosida dimana dalam sistem hukum nasional maupun internasional, objek kejahatan genosida didefinisikan sebatas sekelompok orang berdasar etnis, ras, kewarganegaraan serta agama. Sementara, pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia lebih didasari karena alasan politis, bukan etnis, ras maupun kewarganegaraan.

Nihilnya proses hukum dan minimnya narasi alternatif membuat narasi buatan pemerintah menjadi makin dominan. Pemerintah terutama melalui Menteri Penerangan terus menerus merepetisi narasi lewat institusi formal seperti kurikulum pendidikan maupun lewat simbol-simbol seperti museum, monumen atau slogan-slogan di media massa. Salah satu yang paling melekat adalah propaganda lewat medium film berjudul Pengkhianatan G30S/ PKI yang wajib diputar oleh seluruh stasiun televisi dan bioskop tiap tanggal 30 September dengan mewajibkan seluruh siswa SD ketika itu untuk menontonnya. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) yang memiliki kontrol terhadap cerita yang hendak dibangun –tidak hanya di film ini, tapi juga kontrol untuk menyensor film-film lainnya. Film dibuka dengan adegan sekolah Islam yang diserang sekelompok orang bercelurit dengan tujuan untuk mempertajam konflik kelompok agama dengan kelompok komunis yang dinarasikan sebagai kaum ateis yang biadab. Lalu digambarkan pimpinan PKI yang merencanakan pembunuhan para Jenderal dengan asap rokok yang memenuhi ruangan seperti gangster. Film makin nampak mencekam ketika menyuguhkan adegan putri DI Panjaitan yang membasuh mukanya dengan darah sang Ayah untuk menggambarkan kebrutalan PKI yang telah membunuh para Jenderal. Cara penggambaran tiap adegan yang berfokus pada kebrutalan

dan kekejian PKI menghabisi para Jenderal adalah bukti bahwa film ini secara sengaja ingin mengarahkan penontonnya pada argumen bahwa PKI keji lantas pantas untuk dimusuhi. Narasi kekejaman, yang dipotret oleh sutradara Arifin C. Noer dengan berdasar pada buku dua perwira angkatan darat, Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh ini, kemudian berkembang menjadi narasi dominan yang dijadikan acuan sejarah Indonesia pada masa itu dan masih diyakini kebenarannya oleh banyak masyarakat Indonesia hingga kini (Heryanto, 2006 lih. McGregor, 2018: 254). Cara film ini menempatkan PKI sebagai wujud ateisme, pengkhianatan serta kebiadaban tidak memberi ruang bagi penontonnya untuk memikirkan kemungkinan lain mengenai pembunuhan massal yang terjadi setelahnya terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI padahal tidak tahu-menahu mengenai pembunuhan yang terjadi di rumah para Jenderal.

Pasca berakhirnya rezim militer Soeharto, narasi tentang tragedi 1965 terus mengalami perkembangan. Munculnya para peneliti sosial yang baru, yang bukan termasuk generasi era perang dingin, memungkinkan narasi-narasi alternatif yang lebih kritis muncul (McGregor, 2007; Roosa, 2008). Narasi ini muncul terlebih setelah rezim Orde Baru berhasil ditumbangkan dan para penyintas mulai berani menceritakan pengalamannya tanpa takut ancaman pemenjaraan. Di era ini, narasi sejarah yang resmi dari pemerintah menjadi banyak didiskusikan dan dipertanyakan. Musisi asal Yogyakarta, menyindir pemutaran film pada masa orde baru dalam sebuah lagu berjudul *Bioskop, Pisau Lipat* dimana salah satu liriknya berbunyi “*Kami pakai bendera sebagai seragam, ketika digelandang ke bioskop jam sembilan.*” Persis seperti kelanjutan lirik lagu ini, melalui sebuah tontonan pemerintah mampu menciptakan gambaran sebuah hantu bernama komunisme, “*Kursi-kursi bioskop penuh kutu, Naik dari bangku ke dalam saku, lalu menyelinap ke buku-buku, lalu menggeliat menjadi hantu.*”<sup>1</sup> Marianna Liz mengidentifikasi inisiatif-inisiatif seni yang menyajikan narasi

alternatif termasuk dari seniman kiri yang baru saja dibebaskan dari pengasingan. Salah satunya karya dalang Ki Tristuti Rachmadi yang dulunya merupakan anggota Lekra dan pernah ditahan pada 1965 dan baru bebas pada 1979. Rachmadi pada 1998 kemudian mengeluarkan sebuah karya yang menceritakan pengalamannya sebagai seorang tahanan politik. Barbara Hatley (2009) menyebutkan bahwa karya Rachmadi ini mengawali diskusi di antara anak-anak muda yang lahir pada zaman orde baru dan mulai mencari tahu kebenaran yang ada di balik peristiwa itu. Marianna Lis (2018) kemudian menuliskan salah satu inisiatif seniman muda yang lahir pada 1980an, Maria “Ria” Sulistyani yang mengangkat tema kekerasan politik 1965 sebagai latar cerita teater boneka “*Papermoon Puppet*”.

Liz mengatakan bahwa narasi-narasi ini tidak pernah dipublikasikan secara luas dan menjangkau *audience* dalam level nasional. Narasi-narasi alternatif ini cenderung didiseminasikan secara lokal dan sektoral, misalnya hanya menyentuh pembaca/ pemirsa muda saja. Salah satu alasannya disebabkan oleh persekusi yang kerap dilakukan oleh kelompok anti-komunis terhadap diskusi, pemutaran film serta pameran yang berkaitan dengan kekerasan politik 1965. Tulisan ini selanjutnya akan melihat bagaimana masyarakat sipil berupaya untuk menarasikan sejarah alternatif sambil di saat yang sama mengantisipasi hambatan yang mungkin timbul terutama lewat kanal seni.

## SENI DAN REKONSILIASI

Rekonsiliasi memiliki beragam definisi yang terus berkembang. Rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai proses terbentuknya ikatan sosial yang aktif antara pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik atau dengan kata lain restorasi relasi yang semula rusak antara pihak-pihak yang sempat teralienasi satu sama lain (Assefa dalam Hatley, 2009: 77). Kelman mendefinisikannya secara lebih sederhana dengan menyebut rekonsiliasi sebagai penerimaan yang mutual terhadap identitas yang lain - *mutual acceptance of the other's nationhood and humanity* (Kelman dalam Hatley, 2009: 77). Selain belum jelas dalam mendefinisikan penerimaan seperti apa yang dimaksud, kedua

1 Lagu berjudul *Bioskop, Pisau Lipat* diciptakan oleh grup musik indie asal Jakarta, Melancholic Bitch. Pada 2017, grup musik ini menerbitkan album NKK/BKK berisi lagu-lagu yang menyitir orde baru.

definisi tersebut masih membayangkan pihak-pihak yang berkonflik dalam posisi yang setara. Untuk sampai pada penerimaan yang dimaksud, terlebih dahulu perlu adanya pengakuan terhadap hak “yang lain” sebagai manusia. “*The key element in the process is that of recognizing the right to exist of the other party and the reality of their experiences*”. (Hatley, 2009 :78). Pengakuan akan hak asasi “yang lain” akan tercapai ketika terdapat keadilan (*justice*) dan kebenaran (*truth*) (Brauchler, 2009:7). Dalam diskursus internasional yang mendominasi dewasa ini, keadilan berarti memberi hukuman pada pelaku dengan terlebih dulu mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Namun, ada banyak kasus dimana mengungkapkan kebenaran dan memberikan sanksi pada pelaku tidak secara otomatis menciptakan rekonsiliasi, apalagi ketika korban dan pihak-pihak yang terkait tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Untuk itu, perlu untuk terlebih dahulu mempertanyakan kembali konsep keadilan dan kebenaran yang selama ini seringkali dipakai begitu saja. Ketika berbicara tentang kebenaran, perlu dicermati kembali apa dasar yang menjadikan sesuatu sebagai kebenaran? Kebenaran yang seperti apa yang sedang dicari? Apakah kebenaran individu, kebenaran kolektif? Apakah kebenaran objektif (fakta) atau subjektif (narasi) atau justru intersubjective (yang terbagi) (Forsberg 2003:73). Hal yang sama juga dapat ditanyakan pada konsep keadilan, keadilan untuk siapa? Seringkali upaya mencari kebenaran justru mengarah pada penciptaan sejarah yang tunggal, yang normatif, yang tidak ada bedanya dengan kebenaran yang diciptakan oleh rezim otoriter di masa lalu. Brauchler (2009) menilai bahwa meski rekonsiliasi belakangan ini telah berorientasi pada korban dengan mendorong mereka memberi kesaksian, namun cara-caranya masih menempatkan korban sebagai objek, bukan agen rekonsiliasi. Mereka hanya diletakkan sebagai bagian dari sistem yang diregulasi oleh aktor-aktor di level yang lebih tinggi.

Katherine McGregor bergerak lebih jauh dengan mengatakan bahwa untuk mendapati kebenaran yang emansipatif dan tidak otoritatif, partisipasi pihak yang secara langsung maupun

tidak langsung terlibat dalam konflik untuk menyusun sebuah narasi alternatif menjadi penting. McGregor kemudian menaruh perhatian pada *implicated communities*, sebuah terma untuk menyebut mereka yang tidak secara langsung mengalami kekerasan 1965 tapi merasakan dampaknya, termasuk orang-orang muda yang lahir di pertengahan hingga akhir orde baru. Menurutnya, perlu ada penggalian memori terhadap korban dan *implicated communities* di tengah represi sistemik yang dilakukan lewat penulisan sejarah:

Our lives thus continue to be shaped by the oppressive institutions built on a history of violence, and will continue to be so unless we act to change them. The prejudices which sustained past acts of aggression also live on into the present, and lodge themselves in the minds of the present generation unless we take active steps to remove them. Though we may not be responsible for such acts of aggression in the sense of having caused them, we are “implicated” in them, in the sense that they cause us (Morris-Suzuki dalam McGregor, 2013).

Rekonsiliasi oleh karenanya menjadi ruang bagi pihak dalam konflik untuk membicarakan masa lalu, membimbing subjek untuk memahami dan mengakui pengalaman trauma serta kehilangan dari pihak lainnya (Lederach, 1999). Rekonsiliasi tidak melulu bicara soal perjanjian diplomatik atau gencatan senjata. Rekonsiliasi tidak hanya seputar penurunan intensitas konflik tapi tentang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik sebagai manusia. Rekonsiliasi di titik ini justru lebih efektif ketika dilakukan di level personal. Konsep ini kurang lebih sama dengan argumen Worthington. Menurut Worthington (Helmick, ed., 2002), mengelola rekonsiliasi di level interpersonal menjadi lebih mudah karena tiap individu mengalami langsung pengalaman mendengar, melihat, menjumpai pihak “yang lain”, sehingga kemungkinan akan pengampunan menjadi lebih besar.

Tulisan ini berargumen bahwa ruang yang disebutkan Lederach dapat tersedia lewat kanal seni. Seni menurut Sebastian Kim, et.al (2015) merupakan media yang paling tepat bagi individu untuk mengekspresikan pengalaman yang dialami dan mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap lewat kata. Seni menjadi penting dalam

rekonsiliasi karena ia memberi kesempatan bagi individu untuk menciptakan kembali dimensi fisik, psikologi dan spiritual dari dalam diri manusia sekaligus dimensi milik orang lain. Ia mampu mempertahankan humanisme dan mendorong manusia untuk mengenali orang lain melampaui batas kelompok atau identitas. Dengan kata lain, meminjam tulisan Herbert Marcuse (dalam Kim, 2015), seni mampu menyentuh jiwa manusia untuk mengimajinasikan sesuatu yang lain dari kebiasaan hariannya. Di titik inilah, seni menyediakan ruang yang lebih longgar dan nyaman bagi pihak-pihak dalam konflik untuk bertemu sebagai manusia (*in-human relationship*). Kemampuan seni dalam memberi ruang yang nyaman mampu menembus sekat-sekat waktu yang pernah mengkotak-kotakkan manusia dalam sejarah konflik yang berkepanjangan. Sebuah penampilan seni, menurut Wigham (2014), tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga apa yang mereka inginkan di masa depan. Keduanya bertemu di masa kini. Dalam sebuah pertunjukan kultural dimana perbedaan disatukan, garis batas antara diri (*the self*) dan yang lain (*the other*) dinegosiasikan kembali. “*being redrawn and renegotiated, remain instable and shifting*” (p.208). Teater, secara lebih khusus, hadir untuk merepresentasikan pengalaman pihak-pihak dalam konflik, menyediakan situs bagi komunitas untuk bercerita dan mendengarkan masing-masing pengalaman dan mengembangkan narasi yang lebih kompleks dan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain (Cohen 2004: 6). Kemampuan teater yang reflektif mampu menempatkan manusia dalam posisi yang setara meskipun relasi antar pihak dalam konflik seringkali vertikal karena teater memiliki kemampuan untuk “*opens up a safe, reflective and creative communal space between neighbors and fellow citizens*” and “*develops a range of values and abilities relevant to reconciliation*” (Hutt & Hosking dalam Hatley, 2009).

Bagian berikutnya akan menjelaskan bagaimana rekonsiliasi termanifestasikan dalam sifat-sifat seni melalui tiga strategi yang telah disebutkan di awal tulisan.

## 1.1 Pengemasan narasi alternatif dalam objek yang lebih aman dari persekusi

Perkumpulan penyintas kekerasan 1965 di Yogyakarta, Kiprah Perempuan (Kipper), pada 2013 mengalami persekusi ketika mengadakan sebuah pertemuan bersama ibu-ibu penyintas 1965. Acara yang tadinya hanya arisan biasa dengan ditambah kegiatan kursus memasak terpaksa dibatalkan karena massa telah mengepung lokasi acara yang tidak jauh dari rumah salah satu anggotanya, Svetlana. Selama beberapa minggu, Svetlana harus mengungsi ke rumah kerabatnya di Jakarta kemudian Solo baru kemudian kembali ke rumahnya di Yogyakarta setelah merasa aman. Kasus persekusi juga terjadi dalam beberapa kali penyelenggaraan diskusi film Senyap di beberapa universitas meski seharusnya kampus menjadi wilayah akademik yang netral dan bebas dari intervensi politik (Republika, 2014).

Maraknya persekusi terhadap kelompok penyintas 1965 terutama menjelang tahun politik 2014 menunjukkan bahwa meski orde baru telah diruntuhkan namun ketakutan terhadap komunis dan stigma terhadap orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa itu masih menghantui masyarakat. Ketakutan dan trauma yang sama di sisi lain masih menghantui penyintas hingga membuat mereka harus menyembunyikan identitas, bergerak secara diam-diam untuk bertemu dan mendukung satu sama lain. Diskusi serta pemutaran film tentang 1965 di kampus, tak jarang harus menyarukan diri sebagai acara biasanya, misalnya dalam pemberian judul acara serta pemilihan tanggal yang menghindari 30 September.

Pagelaran teater Gejolak Makam Keramat merupakan salah satu upaya masyarakat sipil untuk mengatasi aneka persekusi di atas. Gejolak Makam Keramat diadaptasi dari naskah berjudul Leng karya Bambang Widjojo, penulis naskah dari Teater Gapit, Solo. Leng (bahasa Jawa dari kata liang) yang mengambil setting tahun 1970an bercerita tentang sebuah makam keramat yang digusur untuk perluasan bangunan pabrik. Adalah Pak Rebo, seorang penjaga makam yang gelisah membayangkan makam Kyai Bakal, pelindung desanya akan ikut tergusur dengan adanya

pembangunan pabrik. Adegan dibuka dengan Kyai Bakal yang berkeluh kesah pada Bongkrek dan Mbok Senik. Bongkrek diperankan oleh Kadmi, seorang calon guru yang ditangkap karena dituduh terlibat dalam Gerwani. Dalam pentas ini, Bongkrek digambarkan sebagai pemuda yang keras kepala, idealis, dan berani mati mempertahankan prinsip. Di antara tokoh lainnya, Bongkrek menjadi yang paling tidak setuju atas pembangunan pabrik. Lewat dialognya dengan Pak Rebo dan Mbok Senik, Bongkrek ternyata memiliki istri dan seorang anak yang sedang sakit. Bongkrek yang hanya bekerja sebagai pemain wayang orang tidak mampu membayar biaya pengobatan anaknya. Singkat cerita, akibat ultimatum istrinya, Bongkrek terpaksa menjual tanahnya pada pabrik agar istrinya mau kembali padanya. Namun, penanganannya yang terlambat membuat anak Bongkrek meninggal bahkan ketika tanah milik Bongkrek telah habis dijual. Bongkrek kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melawan pembangunan pabrik. Namun, ajakan Bongkrek tidak digubris termasuk oleh Pak Rebo yang masih menyangkan rencana penggusuran Makam Kyai Bakal. Kemarahan kemudian membuat Bongkrek nekat membakar pabrik. Tidak dijelaskan bagaimana peristiwanya, pasca pembakaran pabrik Bongkrek hilang. Tidak ada yang berani mencari bahkan menanyakannya, semua menganggap Bongkrek sudah mati. Pada akhirnya, perluasan pabrik terus berjalan dan makam Kyai Bakal menjadi situs yang ada di dalam area pabrik.

Melalui gambaran cerita di atas, dapat diketahui bahwa Gejolak Makam Keramat tidak berusaha secara terang-terangan menarasikan kekerasan yang dialami penyintas pasca tragedi 1965. Pesan mengenai rezim yang otoritatif diceritakan lewat keengganan warga desa untuk terlibat dalam rencana Bongkrek. Di pertengahan cerita, diceritakan tentang Pak Rebo yang merasa was-was akan adanya ancaman dari pihak perusahaan sehingga memilih untuk bersikap diam alih-alih melawan. Selain itu, kemalangan Bongkrek menggambarkan kesusahan masyarakat kelas bawah yang sesuai dengan konteks di masa itu, yang memiliki pilihan untuk melawan tapi berakhir dengan penangkapan atau penghilangan paksa.

Penggunaan teater untuk menjembatani narasi masa kini dengan masa lalu pernah juga dilakukan dalam konflik Fiji pada 2000 serta antara orang kulit putih dan Maori di Selandia Baru. Metode yang dilakukan biasanya adalah dengan meminta peserta untuk menceritakan kisah mereka lalu menunjuk seorang aktor untuk memainkan peran tersebut dengan narasi yang dimodifikasi atau dimetaforakan dalam kisah yang lain lalu mengajak kelompok tersebut untuk mendiskusikan pementasan. Di Indonesia, penggunaan metode teater juga pernah dilakukan oleh sekelompok penyintas di tahun 2005 dalam acara yang digawangi oleh Syarikat dan PUSDEP bertajuk Temu Rindu Menggugat Senyap. (Hatley, 2009:105) Dalam acara ini Kadaryah, seorang pemain ketoprak terkenal di tahun 1960an memainkan lakon perempuan yang dihamili oleh seorang pejabat tua dan kaya. Penonton yang juga merupakan penyintas 1965 kemudian diajak untuk bercerita mengenai hal yang kurang lebih sama dengannya 40 tahun yang lalu. Metode ini kemudian berhasil untuk menggugah penyintas untuk bercerita dan melampaui trauma masing-masing. Meski begitu, Temu Rindu Menggugat Senyap cenderung bersifat tertutup untuk para penyintas saja. Berbeda halnya dengan pertemuan antara penyintas 1965 dengan komunitas muslim khususnya NU yang pernah digagas pula oleh organisasi Syarikat. Dalam pertemuan ini warga NU dan penyintas 1965 bersama-sama memainkan musik, kelompok NU yang memainkan gamelan sementara penyintas yang menyanyikan lagu campursari-nya. Kegiatan ini dilangsungkan di depan monumen militer yang ada di Blitar sebagai bentuk sindiran terhadap narasi sejarah yang selama ini mengkotakkan dua kelompok ini.

Dari sekian banyak teater yang pernah ditampilkan, belum banyak teater yang secara langsung dan eksplisit menyoroti masalah kekerasan 1965 dan menjembatani penyintas dengan komunitas muslim yang berkali-kali menolaknya. Pertunjukan seni yang ada sebagian besar tidak mengumumkan secara langsung topik yang disajikan dan lebih banyak bergerak lewat simbol dan alegori. Selain itu, pertunjukan ini cenderung membatasi target pemirsanya hanya untuk sekelompok orang untuk menjamin agar

kedekatan antara penonton dan aktor dapat terbangun sehingga proses reflektif dari narasi yang hendak disajikan pun dapat tercapai. Dengan begitu, meski teater inklusif terhadap narasi alternatif dari para penyintas, namun teater mensyaratkan ruang yang eksklusif untuk menjamin proses reflektif orang-orang yang terlibat di dalamnya.

## 1.2 Partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi

### *Kiprah Perempuan (KIPPER)*

Teater Tak Mudah Menyerah (Tamara) diinisiasi pertama kali pada awal 2017 dengan melibatkan ibu-ibu penyintas yang sebelumnya sudah berkumpul di bawah payung Kiprah Perempuan (Kipper). Kipper merupakan komunitas yang terdiri dari ibu-ibu penyintas kekerasan 1965 dimana sebagian besar pernah ditahan akibat dugaan keterlibatan dengan organisasi sayap PKI seperti Gerwani, CGMI, BTI atau menjadi korban salah tangkap aparat meski sama sekali tidak memiliki kaitan dengan organisasi-organisasi di atas. KIPPER rutin mengadakan pertemuan bulanan, membangun kelompok kredit mikro yang didanai sendiri, berkunjung ke anggota yang sakit, dan mendiskusikan isu politik dan sosial (Ajar, 2015).

Salah satu pendiri KIPPER, Christina Sumarmiyati, atau sering dikenal dengan Mamik baru saja lulus dari sekolah guru ketika dirinya ditangkap. Waktu itu Mamik berusia 20 tahun dan sedang tertarik pada upaya pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, serta bermimpi untuk bergabung dengan upaya pemberantasan buta huruf. Mamik aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa dan terlibat dalam kelompok seni tari. Pada bulan Desember 1965 ia ditangkap dan ditahan tanpa surat perintah penahanan bersama Ayah dan adiknya. Pada April 1966 Mamik dibebaskan dan kembali mengajar. Namun, pada tahun 1968 ia ditangkap lagi karena dituduh menjadi bagian dari organisasi wanita yang berafiliasi dengan PKI, Gerwani. (Ajar, 2015).

Pendiri lainnya, Sri Muhayati, mahasiswa kedokteran UGM yang ditangkap karena

keaktifannya di organisasi mahasiswa CGMI. Sri mengaku keikutsertaannya dengan CGMI karena ketertarikannya pada aktivitas CGMI dalam membantu mahasiswa yang kesulitan biaya. Kegiatan ini kemudian membuatnya dikeluarkan dari kampus dan ditahan selama lima tahun di penjara Ambarawa serta masih mendapatkan stigma negatif begitu dibebaskan.

Stigma yang menimpa PKI dan keluarganya membuat keduanya berinisiatif mendirikan KIPPER. Menurut mereka, perlakuan yang diterima para penyintas selama di tahanan dan penolakan masyarakat yang terjadi sesudahnya menciptakan trauma tersendiri bagi penyintas. Banyak di antara penyintas yang harus hidup sendiri, tanpa pekerjaan tetap, serta masih dibayang-bayangi rasa takut atas persekusi yang kerap dilakukan kelompok anti komunis hingga sekarang.

Sejak berdiri, KIPPER secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian, diskusi, pembuatan dokumentasi film dan kegiatan seni lainnya. Pada 2013 misalnya, KIPPER turut berpartisipasi dalam Dengar Kesaksian yang diselenggarakan oleh Koalisi Keadilan serta ikut dalam berbagai program penelitian dan advokasi Asian Justice and Rights (AJAR) untuk memberdayakan perempuan penyintas tragedi 1965. Bersama FOPERHAM, KIPPER mengunjungi penyintas-penyintas yang ada di Yogyakarta, mengadakan napak tilas ke beberapa tempat dimana mereka ditahan dan disiksa. Pada 2017, KIPPER bersama Institute of International Studies mengantar mahasiswa mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta yang berkaitan dengan kekerasan politik 1965. Kegiatan ini rencananya akan direpetisi tiap tahun untuk menyediakan ruang bagi narasi sejarah alternatif yang tidak pernah diketahui oleh generasi yang hidup di zaman orde baru dan sesudahnya.

**Gejolak Makam Keramat** merupakan inisiatif KIPPER yang kesekian kalinya dalam menawarkan narasi alternatif tentang tragedi 1965. Bekerjasama dengan seniman asal Yogyakarta, Agung Kurniawan, KIPPER kemudian membentuk kelompok Teater Tamara (Tak Mudah Menyerah) yang menampilkan **Gejolak Makam Keramat** sebagai pentas pertamanya.

Pementasan Gejolak Makam Keramat diawali dengan proses *casting* terhadap 13 penyintas yang akan memerankan Bongkrek, Janaka, Pak Rebo, Kecik, Mbok Senik, narator dan enam pengusaha. Mulai bulan Februari, latihan teater dimulai dengan melibatkan seniman teater lain seperti Irfanudin Ghozali, pengajar musik ISI, Achi Pradipta, serta musisi Frau, Leilani Hermiasih. Seniman-seniman ini pada akhirnya hanya menjadi fasilitator dari cerita yang dirangkai oleh pengalaman penyintas sendiri. Di segmen obrolan Mbok Senik, Janaka dan Pak Rebo misalnya, ketiganya sempat menyinggung persoalan orang yang hilang atau ditemukan tewas setelah menentang pembangunan pabrik. Di bagian ini, Agung sengaja memasukkan nama-nama orang terdekat para penyintas yang hingga kini masih hilang. Maka muncullah nama-nama seperti pegawai KAI yang tertangkap karena diduga anggota PKI, tetangga yang tergabung dalam BTI, atau penyiar radio yang dituduh terlibat Lekra. Disinilah letak modifikasi naskah menyesuaikan konteks dan pengalaman ibu-ibu penyintas.

Pengalaman penyintas juga dinarasikan lewat lagu-lagu pengiring yang diaransemen ulang oleh Leilani dan Eci. Salah satunya berjudul Hari Rabu-Sabtu yang menjadi latar sebuah adegan di warung Mbok Senik. Lagu ini diambil dari cerita para penyintas dimana tiap hari Rabu dan Sabtu para penyintas yang ditahan boleh menerima kiriman/ bingkisan dari sanak keluarganya. Salah satu liriknya menyebutkan makanan-makanan seperti gatot dan tiwul, dua panganan yang terbuat dari singkong yang ketika itu dianggap mewah dibandingkan makanan penjara yang hanya berupa lima butir jagung dan segenggam *dedak/ katul* yang terbuat dari ampas kulit padi. Lagu lain yang diaransemen ulang dan dinyanyikan dalam pentas berjudul Ambarawa, lagu yang ditulis oleh salah satu pemain, Sri Wahyuni, yang merupakan penyanyi keroncong istana di awal 1960an tapi kemudian ditangkap dan ditahan di penjara Ambarawa.

Metode yang dilakukan oleh Agung dkk sebenarnya berupaya untuk mendobrak kecenderungan aktivis sosial belakangan ini yang kerap menjadikan korban sebagai aktor yang

pasif (Brauchler, 2009). Brauchler menyinggung praktisi perdamaian yang seringkali menempatkan korban hanya sebagai penerima bantuan, objek dari konflik dan upaya perdamaian. Menurut Brauchler, untuk mencapai rekonsiliasi perlu adanya identifikasi terhadap kondisi sosio-kultural korban dengan cara mengakui korban sebagai agen rekonsiliasi.

### 1.3 Pelibatan audience dalam proses penyajian narasi

‘In life we tend to make and fix images for ourselves which then influence us and we cannot modify. But the aesthetic space allows democratic interchange, allows us to say ‘OK, that’s the way things are but that’s not the way things should be, and now I am going to create an image of how I want the world to be’. (Boal 1996: 49)

Dalam teater, karakter digambarkan seperti cerminan kaca. Ia mampu menangkap reaksi-reaksi beragam tokoh yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dan diterima. Boal mengatakan bahwa karakteristik teater ini memungkinkan terciptanya ruang yang demokratis untuk bertukar pikiran dan perspektif atas sebuah isu. Teater dengan demikian tidak hanya menyuguhkan pertunjukan dan hiburan namun juga keterlibatan emosi dalam memahami sesuatu, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Soule:

In the first instance theater performances attract and engage viewers as sites of enjoyment and entertainment. By involving the emotions and senses they provide experiential “learning by doing ... more usable and readily accessible than other kinds of learning” (Soule dalam Hatley, 2009:77).

Perspektif di atas nampak jelas dalam gagasan Teater Gejolak Makam Keramat. Teater ini disajikan dalam bentuk semakan dimana panggungnya didesain tidak terpisah dengan penonton. Dalam teater ini, terdapat 13 ibu penyintas yang akan membacakan narasi Gejolak Makam Keramat dilengkapi dengan penonton sebagai aktor ke-14. Ke-13 aktor duduk melingkari sebuah tiang lampu neon yang dibuat seperti lampu gang-gang kecil, kemudian penonton duduk berbaur mengelilingi para

aktor. Mereka dibagi ke dalam empat kelompok yaitu Kelompok Buru, Ambarawa, Plantungan dan Jefferson Library. Keempatnya merupakan penjara khusus tahanan politik perempuan. Sutradara sekaligus pengarah acara, Agung Kurniawan, menjelaskan latar penamaan tempat sebelum pementasan dimulai. Ia menggambarkan Jefferson sebagai sebuah tempat penyiksaan yang mencekam, plantungan sebagai bekas penampungan penderita kusta, atau Ambarawa sebagai salah satu penjara paling dingin yang letaknya di antara pegunungan. Ia lalu mengajak penonton untuk ikut merasakan kengerian tempat-tempat itu selama pentas berlangsung dengan penataan cahaya yang sengaja dibuat temaram cenderung gelap dan efek suara mencekam yang dibuat dari penonton sendiri.

Berbeda dengan teater lainnya, Teater Tamara sudah melibatkan penonton sejak masa latihan. Agung merancang teater ini menjadi teater partisipatif dimana penonton menjadi aktor keempatbelas yang ikut memainkan peran dan mendukung nuansa yang dibangun oleh cerita. Paling tidak terdapat 15 “penonton utama” yang merupakan mahasiswa/ anak muda yang lahir setelah tahun 1990 yang secara rutin mengikuti latihan pementasan teater tiap hari Sabtu. Dalam pentas tersebut, tugas mereka adalah membunyikan efek suara tertentu seperti suara mesin, suara mobil pemadam kebakaran, orang-orang yang berteriak panik hingga suara jangkrik di tengah makam yang *tintrim*.

Dalam sesi refleksi dan evaluasi pasca pementasan, proses latihan ternyata berhasil menjadi ruang berbagi cerita antara penyintas dengan anak muda. Di sela-sela latihan sambil menikmati makan siang, para penyintas biasanya berbagi cerita tentang kisah hidupnya, mulai dari aktivitas mereka sebelum ditahan hingga proses penyiksaan dan penahanan yang berlangsung selama lima sampai sepuluh tahun. Banyak cerita yang kemudian bisa tergalai dari obrolan santai dengan para penyintas terkait pengalaman konflik yang dialami secara personal oleh anggota teater. Muncul cerita misalnya, tentang penyintas yang menjadi korban salah tangkap karena namanya yang sama dengan seorang anggota Gerwani di desanya, padahal sebenarnya dirinya tidak

terlibat dalam kegiatan atau organisasi apapun. Ia mengalami penahanan selama 14 tahun dan masih mendapatkan stigma buruk setelahnya. Muncul juga cerita tentang seorang lulusan sekolah guru yang ingin mengabdikan pada desanya dengan mendirikan TK dan mengadakan program bebas buta huruf namun ditangkap karena diduga terlibat dengan Gerwani dan PKI.

Perjumpaan interpersonal yang melahirkan ruang berbicara ini menurut Worthington (Helmick, ed., 2002) memudahkan proses rekonsiliasi karena tiap individu mengalami langsung pengalaman mendengar, melihat, menjumpai pihak “yang lain”, sehingga kemungkinan akan pengampunan menjadi lebih besar. Dalam konteks Indonesia, penonton yang sebagian besar merupakan anak muda yang lahir di pertengahan menjelang akhir orde baru dipaksa untuk bertemu narasi lain yang selama ini tidak pernah mereka temui di buku-buku. Anak-anak muda ini justru lebih sering diminta untuk memusuhi orang-orang yang kini ada di hadapan mereka. Pertunjukan yang partisipatif seperti ini, menurut Victor Turner, telah berfungsi sebagai cermin –tapi bukan hanya cermin biasa. Ia tidak hanya merepresentasikan ulang budaya yang selama ini dipahami/ ingin ditampilkan oleh performer, tapi juga menawarkan budaya yang bisa jadi berlawanan/ berbeda yang ditangkap oleh spectators/ penonton. Tipe pertunjukan ini sekaligus ingin membongkar garis batas antara performers dan spectators. Dengan kata lain, cara penonton menyaksikan pertunjukan menurut Pfister adalah pertunjukan itu sendiri. Interaksi antara penonton dengan penampil adalah bagian dari pertunjukan yang membuat relasi antara penonton dan penampil selalu dinamis. Batas antara penonton dan pemain menjadi dinegosiasikan kembali.

“This type of performance “‘draws a line’ between self and other—boundary lines that are, however, constantly being redrawn and renegotiated, and remain instable and shifting” (Pfister, 2008: 9). The performance of and reaction to cultural performance, then, consistently redraws the figurative border lines between what designates one landscape and what separates it from neighboring places

Di titik ini, Gejolak Makam Keramat menjadikan dirinya berbeda dari inisiatif kolektif lainnya yang tidak sekedar menempatkan anak-anak muda sebagai penonton, tapi juga subjek rekonsiliasi. Teater ini sama sekali tidak berusaha mendoktrin penontonnya dengan narasi yang baru, tapi memaksa penontonnya untuk mempertanyakan kembali narasi yang selama ini mereka percaya dan membuka ruang pada narasi yang baru. Perkara narasi mana yang ditangkap dan diterima, sama sekali lepas dari kendali aktor maupun sutradara. Dengan begitu, Teater Gejolak Makam Keramat mengamini prasyarat rekonsiliasi Brauchler dimana pihak-pihak di dalamnya harus menjadi agen dari rekonsiliasi, ia bukan hanya individu-individu pasif yang digerakkan dalam sistem.

## SIMPULAN

Teater Gejolak Makam Keramat berupaya menyajikan narasi alternatif dengan melakukan tiga hal yaitu penggunaan seni teater yang reflektif sebagai ruang bicara yang aman, pelibatan penyintas sebagai agen rekonsiliasi, serta pelibatan penonton sebagai bagian dari pembentukan narasi. Meski Teater Gejolak Makam Keramat berhasil menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi pihak-pihak untuk membentuk narasi alternatif namun keberhasilan Teater Gejolak Makam Keramat dalam menyajikan narasi mensyaratkan keterbatasan *audience*. Pengalaman interpersonal antara penonton dan pemain yang membuat narasi alternatif dapat diterima dan dipahami hanya dapat terjadi jika jumlah penonton dibatasi. Di titik ini, studi lebih lanjut mengenai pelembagaan inisiatif dan upaya mengembangkan metode seni untuk rekonsiliasi menjadi perlu untuk dilakukan dalam penelitian yang lain.

## PUSTAKA ACUAN

Asian Justice and Human Rights. (2015). Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan. Jakarta: AJAR.

Brauchler, B. (2009). Introduction: reconciling Indonesia. In B. Brauchler (ed.), *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace* (pp. 3-33). New York: Routledge.

Boal, A. (1996). Politics, education and change. In J. O'Toole and K. Donelan (eds). *Drama, Culture and Empowerment*. Brisbane: Idea Publications

Cohen, C. (2004) *Creative Approaches to Reconciliation*, Boston: Brandeis University.

Conroe, A. The Efficacy of "Dangerous Knowledge: "Children of Victims" in Indonesia After 1965. In McGregor, K., Melvin, J., Pohlman, A (eds.). *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*. Cham: Palgrave Macmillan.

de Brito, A. B. (2001). *The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies*. Oxford: Oxford University Pers.

Hatley, B. (2009) Social reconciliation and community integration through theater. In B. Brauchler (eds.), *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace* (p.77-96). New York: Routledge

Kim, S., Kollontai, P., & Yore, S. (2015). *Mediating Peace: Reconciliation through Visual Art, Music and Film*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Lederach, J. P. (1999). *Building Peace : Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United State Institute of Peace Press.

Leksana, G. (2009). Reconciliation Through History Education: Reconstructing the Social Memory of the 1965–66 Violence in Indonesia. In B. Brauchler (ed.), *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace* (pp. 175-191). New York: Routledge.

Lis, M. (2018). The History of Loss and the Loss of History: Papermoon Puppet Theatre Examines the Legacies of the 1965 Violence in Indonesia. In McGregor, K., Melvin, J., Pohlman, A (eds.). *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*. Cham: Palgrave Macmillan.

McGregor, K., Melvin, J., Pohlman, A., (2018). New Interpretations of the Causes, Dynamics and Legacies of the Indonesian Genocide. In McGregor, K., Melvin, J., Pohlman, A (eds.). *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*. Cham: Palgrave Macmillan.

McGregor, K. (2007) *History in Uniform: Military ideology and the construction of the Indonesian past*. Singapore: NUS Press.

McGregor, K. (2013) Memory Studies and Human Rights in Indonesia. *Asian Studies Review* 37:3, 350-361

Melvin, J., Pohlman, A. (2018). A Case for Genocide: Indonesia, 1965-1966. In McGregor, K., Mel-

- vin, J., Pohlman, A. (eds.). *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Roosa, J. (2008) *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Robinson, G.B. (2018). *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-1966*. Oxford: Princeton University Press.
- Melvin, J. (2018). *The army and the Indonesian genocide : mechanics of mass murder*. New York: Routledge.
- Wahyuningroem, S. L. (2013). Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 115–142.
- Worthington, E. L. (2001). Unforgiveness, Forgiveness, and Reconciliation and Their Implications for Societal Interventions. In R. G. Helmick, *Forgiveness and reconciliation : religion, public policy, and conflict transformation* (pp. 171-192). Pennsylvania: Templeton Foundation Press.
- Whigham, K. (2014). Performing a future (in) performing a past: Identity, cultural performance, and the Utopian impulse. *Journal of Tourist Studies* Vol. 14(2), 203–224.

**STT**  
**NO.1052/SK/DITJEN/PPG/STT/1986**

ISSN 977-0125-9989-1-9



9 770125 998919

LIPI Press